

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uni Emirat Arab atau dikenal dengan UEA merupakan sebuah negara di kawasan Timur Tengah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil. Negara ini didirikan pada 2 Desember 1971 sebagai negara federasi setelah pasukan Inggris menarik diri dari wilayah Teluk. UEA terbentuk setelah Inggris mengumumkan untuk tidak menjamin kembali keamanan di negara-negara federasi tersebut pada tahun 1968. Negara ini terdiri atas tujuh federasi yang memutuskan untuk bergabung, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Sharjah, Ajman, Fujairan, dan Umm al-Qaiwan dengan menunjuk seorang presiden bernama Syekh Zayid bin Sultan Al Nahyyan. Ibukota dari UEA terletak di Abu Dhabi yang merupakan federasi terbesar di negara ini. Jumlah penduduk UEA diperkirakan mencapai 10 juta jiwa dengan 90% diantaranya merupakan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut (Katzman, 2022, p. 1). Meskipun negara ini masih tergolong muda, UEA telah berhasil menjadi salah satu perekonomian terkuat di kawasan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan negaranya pernah menjadi pusat perdagangan komoditi mutiara sekaligus pusat perdagangan yang menghubungkan kawasan Asia dengan kawasan Eropa. Tidak hanya itu, UEA juga menjadi tempat transit bagi berbagai penerbangan internasional, pelabuhan internasional, hingga menjadi jalur untuk perdagangan pipa minyak internasional sekaligus sebagai pusat jalur perdagangan wilayah Timur Tengah (Khaeruddin & Hidayat, 2020, p. 57). Dengan peranannya ini menunjukkan bahwa UEA merupakan negara dengan posisi yang kuat di Timur Tengah.

Selain posisinya yang strategis dalam sektor perdagangan, UEA juga memiliki kekayaan yang berhasil menjadikan negaranya sebagai pusat

manajemen kekayaan global sehingga perusahaan jasa keuangan swasta terkemuka, seperti Citigroup dan HSBC tertarik untuk mengembangkan bisnis mereka di kawasan Timur Tengah (Arabian Business, 2021). Berdasarkan laporan yang ditulis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada *World Investment Report 2022* menyatakan bahwa nilai arus masuk investasi atau penanaman modal dari pihak asing yang disebut Foreign Direct Investment (FDI) milik UEA berhasil mencapai tingkat pertumbuhan di angka 4 persen dengan total nilai investasi asing di tahun 2021 mencapai \$20,7 miliar (Dh76 miliar). Nilai investasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2020 yang hanya mencapai \$19,884 miliar (Dh73,04 miliar). Laporan ini juga menyebutkan bahwa saldo kumulatif aliran masuk FDI milik UEA mengalami peningkatan dengan jumlah sekitar \$171,6 miliar. Hal ini membuat UEA berhasil menempati posisi pertama dalam hal penanaman modal asing di wilayah Middle East and North Africa (MENA) karena menyumbang sebanyak \$66,6 miliar di wilayah tersebut (Sebugwaawo & Times, 2022).

Tidak sekadar kekayaan yang berbasis nilai investasi, kekayaan UEA juga ditopang oleh sumber daya alam yang dimilikinya. Kekayaan minyak bumi dan gas alam milik UEA dibuktikan dengan adanya penemuan 7 miliar barel minyak bumi dan 1.64 triliun meter kubik gas konvensional dan 4,53 triliun meter kubik gas non-konvensional di November 2019 yang berhasil meningkatkan cadangan minyak mentah UEA menjadi 105 miliar barel dan 7.73 triliun meter kubik gas konvensional yang dapat dipulihkan. Hal ini membuat UEA berhasil menaikkan posisi dari peringkat ketujuh menjadi peringkat keenam sebagai pemilik cadangan hidrokarbon terbesar di dunia (Kutlu, 2020). Penemuan ini juga berhasil mengantarkan UEA menjadi pemilik cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi di kawasan Timur Tengah dengan akumulasi total cadangan minyak sebesar 97,8 miliar barel (5,65%) di tahun 2020 (Kusnandar,

2021). Cadangan hidrokarbon yang dimiliki UEA terus mengalami peningkatan sebesar 2 miliar *stock tank barrels* (STB) dari sebagian besar minyak mentah kelas Murban dan 1 triliyun atau *trillion standard cubic feet* (TSCF) gas alam di tahun 2022 (Dahan & Swilam, 2022).

Potensi yang dimiliki oleh UEA tidak hanya berkaitan dengan kekayaan domestiknya namun juga kekuatan militer yang menopang keamanan negara tersebut. Potensi militer ini ditunjukkan dengan kekuatan militer UEA yang memiliki sekitar 63.000 personel berseragam aktif untuk populasi 9,9 juta penduduk. Kekuatan militer UEA juga didukung dengan banyaknya persenjataan canggih dan kuat yang dimiliki oleh UEA, seperti jet modern, tank tempur, hingga kapal angkatan laut (D. B. Roberts, 2020, pp. 315–318). Dengan jumlah personel yang besar dan didukung oleh peralatan yang memadai, UEA memiliki peluang untuk mengembangkan kekuatan militernya menjadi lebih kuat yang dapat membantu melindungi keamanan dalam negeri hingga kawasan (Dalton & Shah, 2021).

Seluruh kekayaan yang potensial, wilayahnya yang strategis, hingga didukung oleh kekuatan militer yang memadai telah mengantarkan UEA menjadi salah satu negara terkuat di kawasan Timur Tengah. Namun, hal ini tidak serta merta membuat UEA merasa aman dari berbagai potensi ancaman di sekitarnya yang mampu mengganggu stabilitas keamanan negara. Potensi ancaman ini berkaitan dengan sektor perekonomian dan keamanan UEA yang berkaitan dengan kehadiran Iran.

Gambar 1. 1 Peta Uni Emirat Arab



Sumber Gambar : <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56354164>

Jika dilihat pada gambar 1.1, wilayah UEA memiliki kedekatan geografis secara langsung dengan Iran sehingga negara ini harus dibayangi oleh rasa takut terhadap ancaman agresifitas Iran yang dapat menyerang kapanpun. Selama bertahun-tahun, para pejabat UEA menganggap Iran sebagai bahaya yang dapat merusak stabilitas negara. Pada sektor ekonomi, UEA memiliki potensi ancaman dengan kehadiran Iran di Selat Hormuz yang merupakan rute utama bagi perdagangan minyak global, khususnya bagi perdagangan UEA (Ratner, 2018, p. 5). Kekhawatiran ini dilandasi oleh agresifitas Iran yang ditujukan dengan adanya latihan militer pasukan Iran yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan nasional negaranya untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar. Selain itu, Iran juga memberikan ancaman akan menutup selat tersebut dan menyerang setiap aktivitas perdagangan yang melalui jalur tersebut (Carl, 2020). Melihat kehadiran Iran yang semakin agresif dengan kekuatan militer dan ancaman yang diberikan membuat UEA khawatir terhadap kegiatan perdagangan minyaknya karena sebagian besar perekonomian UEA ditopang oleh komoditi tersebut. Tidak hanya ancaman

pada sektor ekonomi, ancaman lain yang juga ditimbulkan oleh Iran berkaitan dengan sektor keamanan nasional. UEA melihat bahwa Iran semakin agresif melakukan ekspansi penyebaran Syiah ke negara-negara, seperti Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman yang disertai pembentukan program senjata nuklir (Alexander, 2021). Selain ekspansi tersebut, UEA juga terancam dengan kekuatan militer Iran yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasionalnya kapanpun. Sebagai contohnya, UEA mendapatkan serangan rudal balistik pada Februari 2022. Sebelum serangan pada bulan Februari, UEA juga sudah mendapatkan serangan ketiga dari pasukan yang didukung Iran di Yaman pada Januari 2022 dimana serangan ini ditujukan sebagai pesan permusuhan dari Teheran untuk seluruh wilayah Teluk dan Timur Tengah. Sedangkan serangan pertama yang dilakukan ditujukan untuk menyerang bandara internasional dan instalasi perusahaan minyak negara, yaitu Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Serangan ini berasal dari pemberontak Houthi namun memiliki kemiripan dengan serangan yang diberikan oleh Teheran (Gardner, 2022). Serangan ini menunjukkan bahwa negara yang kaya akan potensi minyak memiliki kerentanan terhadap keamanan dan stabilitas yang telah dibanggakan sejak lama.

Kekhawatiran lain yang juga dirasakan oleh UEA bagi keamanan nasionalnya berkaitan dengan kepemilikan nuklir. Senjata nuklir yang dimiliki Iran dianggap akan merusak hegemoni regional sekaligus tatanan politik domestik UEA. UEA juga khawatir akan revolusi Islam yang berkembang di Iran yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik UEA karena negara ini menganut kebijakan konservatif (Ayorlou, 2022). Tidak hanya itu, UEA juga khawatir dari sisi keamanan sosialnya dengan banyaknya penduduk Iran yang tinggal di negaranya. Dengan banyaknya potensi ancaman ini, UEA menganggap bahwa kehadiran Iran dapat menimbulkan tantangan bagi politik domestiknya.

Berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Iran membuat keamanan negara UEA mengalami ketidakstabilan yang dapat mengganggu kepentingan nasional negara ini. Sebagai negara dengan banyak potensi sumber daya dan investasi, UEA ingin berkembang menjadi negara kuat di kawasan Timur Tengah. UEA ingin menguatkan posisinya dalam kekuatan politik regional, mengamankan jalur perdagangannya hingga menciptakan stabilitas keamanan domestiknya. Namun, hal ini tidak mudah dicapai apabila persoalan keamanan masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah UEA berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer dan pertahanan yang dimilikinya dengan menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara yang dianggap mampu mewujudkan kestabilan negaranya. Dalam hal ini, pemerintah UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena kedua negara memiliki kesamaan dalam melawan ancaman hegemonitas Iran yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Iran dan ekspansi Iran (Norlen & Sinai, 2020).

Sebagai negara kecil yang ambisius di kawasan Teluk Persia, UEA menghadapi berbagai macam ancaman ekonomi maupun keamanan negara karena letak geografisnya menempatkan negara ini pada kerentanan stabilitas dan persaingan regional di Timur Tengah. Oleh karena itu, pemerintah UEA melakukan berbagai kerjasama dalam hubungan diplomatik dengan Israel untuk membantu mencapai kepentingan nasional, khususnya dalam mempertahankan kekuatan ekonominya dan mewujudkan stabilitas keamanan negaranya. Hubungan diplomatik kedua negara ini diimplementasikan dalam berbagai peluang kerjasama dan diresmikan kepada publik dengan menandatangani sebuah perjanjian damai yang dikenal dengan nama Abraham Accord. Kerjasama yang dilakukan oleh UEA dengan Israel inilah yang nantinya akan mengantarkan UEA untuk memperkuat posisinya sebagai

kekuatan ekonomi di Timur Tengah dan mengamankan negaranya dari ancaman Iran yang semakin agresif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah UEA dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Penulis kemudian mengajukan satu rumusan masalah, yaitu : **Bagaimana Strategi Diplomasi Uni Emirat Arab dalam Mengimplementasikan Kesepakatan Abraham Accord terhadap Israel untuk Mempertahankan Kekuatan Ekonomi dan Menjaga Keamanan Negara pada tahun 2020-2022?**

C. Kerangka pemikiran

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Sugiyono (2017) di dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, kerangka berfikir didefinisikan sebagai sebuah sintesa yang dapat mencerminkan hubungan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Sugiyono (2017) juga menambahkan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar untuk menyusun kerangka pemikiran yang akan membuahkan hipotesis (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penjabaran tersebut yang didukung oleh latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang bertujuan untuk memperkuat analisis fenomena yang diangkat di dalam penelitian, teori dan konsep tersebut diantaranya, adalah : realisme neoklasik dan *multitrack diplomacy*

1. Realisme Neoklasik

Realisme merupakan sebuah teori dalam studi ilmu hubungan internasional yang banyak digunakan oleh para akademisi maupun mahasiswa untuk mengkaji dan menganalisis perilaku negara dalam berhubungan dengan negara lain di kancah internasional. Teori ini mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu menjadi beragam pemikiran baru yang salah satunya adalah realisme neoklasik. Pemikiran realisme neoklasik digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain pada tatanan internasional. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori realisme klasik dan teori neorealisme yang berkembang sebelumnya. Berbeda dengan neorealisme yang merupakan teori politik internasional, gagasan realisme neoklasik adalah teori kebijakan luar negeri yang lebih menjelaskan bagaimana perilaku negara secara individual. Dalam gagasannya, teori ini memasukkan variabel struktur-anarki dan distribusi kapabilitas, dan unit faktor-faktor domestik negara untuk memahami bagaimana perilaku negara dalam pentas internasional (Rosyidin, 2020, p. 34).

Teori realisme neoklasik pertama kali dikembangkan Rose Gideon pada tahun 1998 yang ditulis dalam artikelnya berjudul "*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*" yang berusaha menganalisis kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara dipengaruhi oleh struktur internasional dan faktor domestik. Asumsi ini berakar dari penggabungan teori realisme klasik dan neorealisme. Teori realisme klasik berpendapat bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal sebuah negara dalam sistem yang anarki yang berarti persepsi dari pemimpin negara dan elit politik akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri (Aryaputri, 2018; Firoozabadi & Ashkezari, 2016, p. 96). Sedangkan teori neorealisme berasumsi bahwa sikap suatu negara dipengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi dalam sistem internasional, seperti ancaman atau dorongan untuk merespon suatu fenomena.

Penggabungan asumsi kedua teori ini yang kemudian melahirkan teori realisme neoklasik yang meyakini bahwa proses pengambilan kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh sistem internasional tetapi juga oleh faktor domestik. Pernyataan ini juga semakin diperkuat oleh Rosyidin dalam bukunya “*Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*” bahwa realisme neoklasik juga memiliki persamaan asumsi dengan neorealisme yang mengatakan *struktur internasional merupakan driving force perilaku negara*. Namun, struktur internasional tidak akan cukup menyelaraskan perilaku negara karena tidak semua negara memiliki perilaku yang sama atau seragam. Hal ini membuat teori realisme neoklasik menambahkan variabel struktur anarki, variabel unit faktor-faktor domestik, dan distribusi kapabilitas. Variabel struktur anarki berkaitan dengan tidak adanya kedaulatan universal atau pemerintah di tatanan dunia internasional yang kemudian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sehingga keadaan yang anarki ini membuat negara perlu melakukan penyesuaian tindakan agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Variabel distribusi kapasitas dapat diartikan juga sebagai kekuatan materi negara, yang dapat berupa sumber daya alam, ekonomi, sosial, hingga militer yang dapat menghasilkan dampak tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri (Purba et al., 2022, pp. 347–349). Penambahan variabel domestik juga akan menjelaskan bahwa setiap negara memiliki respon yang berbeda-beda terhadap *structural constraint* dikarenakan adanya keberagaman karakteristik domestik setiap negara yang tidak sama. Variabel domestik ini yang akan menjadi jembatan antara struktur internasional dengan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara (Rosyidin, 2020, pp. 34–35). Variabel domestik atau karakter domestik ini dapat berupa kapasitas lembaga politik militer, pengaruh aktor domestik dan kelompok kepentingan, hingga derajat otonomi negara dari masyarakatnya dan tingkat kohesi elit atau masyarakat. Hal ini berarti variabel domestik tidak dapat dikesampingkan oleh negara

karena merupakan salah satu faktor utama suatu kebijakan luar negeri diputuskan. Pernyataan ini diperkuat oleh Rose dalam artikelnya bahwa :

“Neoclassical realism explicitly incorporates both external and internal variables, updating and systematizing certain insights drawn from classical realist thought. Its adherents argue that the scope and ambition of a country’s foreign policy is driven first and foremost by its place in the international system and specifically by its relative material power capabilities. This is why they are realists. They argue further, however, that the impact of such power capabilities on foreign policy is indirect and complex, because systemic pressures must be translated through intervening variables at the unit level. This is why they are neoclassical (Rose, 1998, p. 146).

Teori neoklasik memang pengembangan dari pemikiran teori realisme, namun pemikiran yang tertuang di dalam neoklasik tidak sekadar membahas tentang masalah keamanan negara namun juga menganalisis faktor penyebab perilaku negara. Kajian mengenai teori realisme neoklasik juga semakin diperkuat oleh artikel yang ditulis oleh Zakaria berjudul *“Realism and Domestic Politics: A Review Essay”* dimana artikel tersebut menyatakan bahwa pembentukan kebijakan luar negeri memang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Namun Zakaria menambahkan beberapa variabel dalam kedua faktor tersebut. Misalnya dalam faktor eksternal, pengambilan keputusan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh struktur internasional namun juga distribusi kekuatan. Sedangkan dalam faktor internal, pengambilan kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh struktur domestik namun juga struktur ekonomi maupun struktur politik. Sebagai tambahan, teori realisme neoklasik juga mempertimbangkan aspek non-struktural, seperti karakter yang dimiliki pemimpin negara ataupun tanggapan publik dalam menentukan kebijakan luar negeri (Maharani, 2018; Zakaria, 2012).

Pemahaman lebih mudahnya teori realisme neoklasik adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa, bagaimana dalam kondisi yang bagaimana sebuah negara mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan

luar negerinya. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara berkaitan dengan hubungan antara struktur internasional dengan faktor domestik. Artinya teori ini melihat bagaimana posisi negara dalam konteks internasional tanpa melupakan faktor domestiknya (Purba et al., 2022).

Gambar 1. 2 Operasional Teori Realisme Neoklasik tentang Kebijakan Luar Negeri UEA terhadap Israel



Sumber : Rosyidin, M. (2020). Teori Hubungan Internasional : Dari Perspektif Klasik sampai Non Barat. PT RajaGrafindo Persada.

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bagaimana operasional dari teori realisme neoklasik digunakan. Dalam teori realisme neoklasik, indikator faktor struktural digunakan untuk melihat kondisi anarkis yang dialami oleh suatu negara, baik itu berupa ancaman atau dorongan dari lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri terbentuk. Kemudian, indikator faktor domestik akan melihat variabel distribusi kapasitas yang dapat berupa kekayaan negara, seperti sektor ekonomi maupun keamanan sebagai sebuah kepentingan yang harus dicapai sehingga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Analisis pada pendekatan realisme neoklasik inilah yang digunakan untuk menjabarkan bagaimana kebijakan luar negeri pemerintah UEA dalam menjalin hubungan terhadap Israel.

2. *Multitrack Diplomacy*

Diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni yang digunakan dalam bernegosiasi, khususnya berkaitan dengan perjanjian antar negara maupun keahlian dalam berpolitik. Selain itu, diplomasi juga bisa diartikan sebagai praktik dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara yang dilakukan dengan cara bernegosiasi dengan negara lainnya. Diplomasi memiliki keterkaitan erat dengan politik internasional karena mengedepankan kepentingan suatu negara ketika berhubungan dengan negara lain. Kehadiran diplomasi dianggap penting karena dapat memelihara hubungan-hubungan yang terjalin antar satu negara dengan negara lainnya, baik secara politik maupun non-politik yang dapat meningkatkan nilai-nilai kepentingan bersama. Diplomasi memiliki keterkaitan dengan politik luar negeri dan merupakan instrumen penting di dalamnya. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan, baik diplomasi maupun politik luar negeri adalah hal yang berbeda. Jika politik luar negeri didefinisikan sebagai sebuah kerangka tindakan yang akan menjadi landasan sebuah negara mengambil sikap untuk mencapai kepentingannya, maka diplomasi adalah alat yang digunakan untuk menjalankan politik luar negeri tersebut. Secara ringkas penjelasannya, politik luar negeri adalah substansi dan diplomasi adalah metode yang digunakan (Roy, 1995, pp. 3–6).

Secara tradisional, diplomasi dilakukan oleh aktor negara dengan negara lain. Namun, hal ini sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan zaman yang telah melibatkan banyak aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasi. Dalam perkembangan tersebut, praktik diplomasi telah berkembang dan memiliki banyak variasi yang dikenal dengan nama *multitrack diplomacy*. *Multitrack diplomacy* disebutkan telah hadir dan dilakukan sejak dua dekade terakhir dalam praktik diplomasi. Praktik ini dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan dengan perdamaian, perdagangan, perekonomian, kebudayaan, lingkungan,

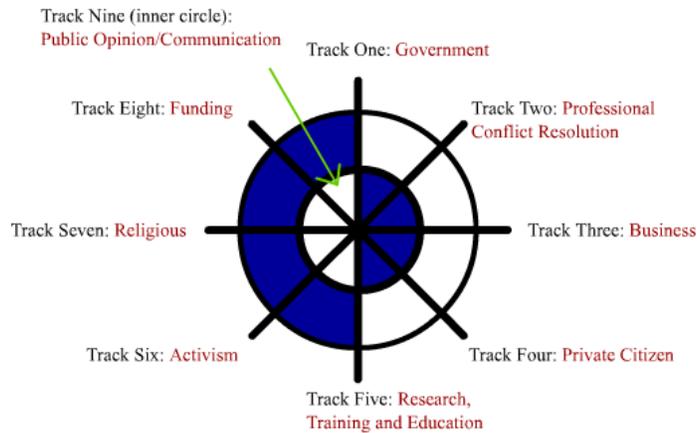
dan kepentingan lainnya (Aini, 2019, pp. 57–58). Pada awalnya, konsep ini dikembangkan oleh Joseph Monthvile di tahun 1981 yang menjelaskan tentang jalur satu dan dua. Setelah berjalannya waktu, konsep ini dikaji dan dikembangkan lagi oleh Duta Besar AS bernama John W. McDonald yang dituliskan dalam buku pertamanya berjudul “*Conflict Resolution : Track Two Diplomacy*” pada tahun 1985 dan diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1987. Dua tahun berikutnya, konsep ini masih terus mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya berjumlah dua *track* menjadi lima *track* di tahun 1989. Perkembangan konsep ini masih terus berlanjut dengan adanya penambahan *track* yang awalnya lima *track* menjadi sembilan *track*. Pengembangan konsep ini dilakukan oleh John W. McDonald dengan Louise Diamond dalam buku mereka yang berjudul “*Multi-Track Diplomacy : A System Approach to Peace di tahun 1991*” (Galloway, 2011).

Dalam buku karya Louise Diamond dan John McDonald, keduanya menyampaikan bahwa ‘*multitrack diplomacy*’ didefinisikan sebagai sebuah konsep diplomasi yang menjelaskan bagaimana perdamaian dunia dapat terbentuk dalam sistem internasional dengan melibatkan banyak aktor dan jalur, seperti diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, hingga diplomasi jalur individu. *Multitrack diplomacy* ini digunakan untuk mencapai perdamaian dunia hingga *peacebuilding* yang saling terintegrasi satu sama lain menggunakan *soft power* (Saputra, 2019, p. 264). Jika dilihat dari *website online* milik Institute for Multi Track Diplomacy, *multitrack diplomacy* melibatkan berbagai macam kegiatan dan aktor, seperti individu, lembaga, hingga komunitas yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam hal perdamaian dunia. Konsep ini menggabungkan seluruh aspek mediasi dari seluruh tingkatan lapisan masyarakat, mulai dari warga negara kalangan bawah hingga kepala negara sebagai pusat tertinggi untuk bisa

menentukan kebutuhan yang akan dicapai dan memfasilitasi adanya komunikasi kedua belah pihak (Aini, 2019, p. 59; Diamond & Donald, 1996).

Konsep *multitrack diplomacy* yang telah dikembangkan oleh Diamond dan Donald terdiri atas sembilan *track* yang merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi, yaitu *Track One : Government; Track Two : Nongovernment / Professional; Track Three : Business; Track Four : Private Citizen; Track Five : Research, Training, and Education; Track Six : Activism; Track Seven : Religion; Track Eight : Funding; Track Nine : Communication and Media*. Setiap jalur dari *multitrack diplomacy* ini memiliki upaya atau strategi yang berbeda-beda dengan aktor yang berbeda untuk mencapai kepentingan nasional. Kehadiran *multitrack diplomacy* ini karena adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menangani isu-isu yang kompleks dalam setiap aspek dan memerlukan bantuan aktor-aktor non negara untuk membantu mencapai kepentingan nasional dan menyelesaikan isu yang dihadapi. Konsep ini juga berarti bahwa diplomasi yang dilakukan oleh suatu aktor memanfaatkan *soft-power* untuk mencapai kepentingan nasional yang dikehendaki dan mewujudkan perdamaian dunia. Adanya konsep ini memperlihatkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman di tengah abad ke-21, perdamaian tidak hanya melibatkan kekuatan militer (*high politics*), namun juga kekuatan-kekuatan non militer (*low politics*), seperti kerjasama dalam berbagai bidang. Konsep ini dinilai lebih efektif karena meminimalisir adanya intensitas terjadinya konflik antar kedua belah pihak (Diamond & Donald, 1996; Diani, 2014, pp. 18–19).

Gambar 1.3 *Multitrack Diplomacy* / Sembilan Jalur Diplomasi



Sumber : https://www.beyondintractability.org/essay/multitrack_diplomacy

Pada gambar 1.3 menyebutkan bahwa terdapat sembilan jalur sebagai hasil perkembangan dari kedua jalur yang sebelumnya telah disampaikan pada konsep *multitrack diplomacy*. Jalur pertama disebut sebagai *Government* atau dikenal sebagai *Peacemaking through Diplomacy* membahas tentang diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara dan biasanya direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Jalur ini disebut juga sebagai bentuk diplomasi tradisional karena dilakukan oleh negara atau dikenal dengan diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal. Jalur ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dengan melakukan tindakan *peacebuilding* ataupun *peacemaking* yang dilakukan pada tingkat pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk membentuk, mengelola, dan meningkatkan sistem hubungan internasional yang dapat berupa mediasi, resolusi konflik, kepercayaan, krisis intervensi, mencegah kekerasan hingga mengamankan kepentingan nasional suatu negara dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan sektor lainnya. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang merupakan warga negara maupun berasal dari berbagai kelompok kepentingan dianggap memiliki kedudukan formal dalam sistem global.

Jalur kedua yang disebut sebagai *Nongovernment* atau dikenal sebagai *Peacemaking through Conflict Resolution* membahas tentang diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, seperti organisasi ataupun individu profesional untuk mencapai resolusi konflik. Pada jalur ini, aktor-aktor non negara yang profesional diberikan kesempatan untuk menganalisis, mencegah, memecahkan, maupun mengelola konflik-konflik yang terjadi di lingkungan internasional. Diplomasi pada jalur kedua ini hakikatnya sebagai pendukung untuk membantu aktor negara, yaitu pemerintah agar dapat menjalin komunikasi dan negosiasi terhadap isu yang dihadapi. Para aktor non negara yang profesional akan membuka jalan demi terciptanya negosiasi dan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh para pejabat resmi pemerintah. Jadi, jalur kedua ini dapat diartikan sebagai perpanjangan jalur dari diplomasi pada jalur pertama. Namun, jalur kedua ini tidak dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintah dalam hal kebijakan luar negeri yang diambilnya.

Jalur ketiga yang disebut sebagai *Business* atau dikenal dengan *Peacemaking through Commerce* membahas tentang diplomasi yang dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komersial, seperti melakukan hubungan dagang yang bersahabat, menciptakan kerjasama yang menguntungkan melalui lingkup bisnis dengan tujuan membangun perdamaian antar negara melalui isu-isu *low politics*. Jadi, aktor non negara pada jalur ini lebih banyak terlibat dalam menyediakan peluang ekonomi internasional, hubungan persahabatan, penyediaan saluran komunikasi informal untuk menciptakan perdamaian. Aktor-aktor non negara inilah yang akan membuka pintu hubungan bagi sektor swasta dan umum untuk saling bertukar komunikasi sehingga dapat mengurangi tekanan yang mengakibatkan kemiskinan ekonomi dan kemudian berujung menimbulkan konflik.

Jalur keempat yang disebut sebagai *Private Citizen* atau dikenal dengan *Peacemaking through Personal Involvement* membahas tentang keterlibatan personal warga negara. Jalur ini melibatkan warga negara dalam berbagai

kegiatan perdamaian dan pembangunan melalui diplomasi antar warga negara, seperti program pertukaran organisasi sukarela (*voluntary organizations*), organisasi non pemerintah, dan bahkan para kelompok kepentingan tertentu. Warga negara yang terlibat dalam jalur ini tidak hanya individu namun juga kelompok masyarakat. Jalur keempat ini sering disebut sebagai diplomasi yang bersifat *grassroots* karena banyak melibatkan aksi lokal.

Jalur kelima yang disebut sebagai *Research, Training, and Education* atau dikenal dengan *Peacemaking through Learning* membahas tentang diplomasi yang dapat dilakukan melalui tiga aspek. Aspek pertama adalah *research* atau penelitian yang berarti memiliki hubungan dan keterkaitan langsung dengan universitas, lembaga *think tank* dan pusat penelitian yang memiliki fokus kajian tertentu. Aspek kedua, yaitu training atau penelitian yang berarti menyediakan program pelatihan ketrampilan praktisi, seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik dan sebagai fasilitator pihak ketiga. Aspek ketiga, yaitu *education* atau pendidikan dengan menyediakan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi melalui program PhD yang mencakup berbagai aspek studi global maupun lintas budaya. Contohnya adalah studi perdamaian dan tatanan dunia; analisis konflik, manajemen dan resolusi konflik.

Jalur keenam yang disebut sebagai *Activism* atau dikenal dengan nama *Peacemaking through Advocacy* yang membahas tentang diplomasi yang dilakukan melalui advokasi para aktivis. Diplomasi yang dilakukan oleh para aktivis dilakukan dalam berbagai isu di lingkungan sekitar, seperti sosial, lingkungan, hak asasi manusia, keadilan ekonomi, pelucutan senjata hingga advokasi khusus para kelompok kepentingan yang memiliki hubungan dengan pemerintahan.

Jalur ketujuh yang disebut sebagai *Religion* atau dikenal dengan nama *Peacemaking through Faith in Action* membahas tentang diplomasi yang melibatkan keyakinan dan tindakan yang berorientasi kepada perdamaian komunitas spiritual dan agama. Jalur ini memandang bahwa aktor-aktor yang

terlibat pada jalur ketujuh akan melibatkan pendekatan-pendekatan berbasis keyakinan dan nilai universal tentang kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian dan menyelesaikan permasalahan atau konflik.

Jalur kedelapan yang disebut sebagai *Funding* atau dikenal dengan nama *Peacemaking through Providing Resources* membahas tentang diplomasi yang berkaitan dengan komunitas pendanaan, yayasan milik individu yang mampu menyediakan pendanaan, pemberian sumber daya ataupun aktivitas filantropi. Diplomasi yang dilakukan pada jalur ini berarti memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jalur lain. Hal ini mengandung arti bahwa jalur kedelapan berperan sebagai pemberi dukungan finansial untuk merealisasikan atau mempermudah kegiatan *track* lainnya.

Jalur kesembilan yang disebut sebagai *Communications and the Media* atau dikenal dengan nama *Peacemaking through Information* membahas tentang diplomasi yang dapat dilakukan dengan melakukan penyebaran informasi dan jalinan komunikasi. Jalur ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan pemahaman tentang resolusi konflik dan hubungan internasional kepada masyarakat luas. Pada jalur ini, suara rakyat yang merupakan opini publik akan dibentuk dan diekspresikan melalui berbagai instrumen, seperti media cetak, film, video, radio, seni, hingga sistem elektronik untuk menciptakan hal persuasif yang dapat mendorong terciptanya perdamaian (Aini, 2019; Aulia, 2020; Diamond & Donald, 1996; Shofia, 2019).

Studi mengenai *multitrack diplomacy* inilah yang digunakan untuk melihat perilaku-perilaku UEA dalam mengimplementasikan kesepakatan Abraham Accord terhadap Israel untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Berdasarkan penjabaran dari setiap jalurnya, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pemerintah UEA akan dibagi sesuai dengan aktor yang berperan dan sektor apa yang menjadi pembahasan kerjasama. Pembagian ini dilakukan untuk lebih mudah mengetahui dan memahami perilaku yang dilakukan oleh

aktor-aktor UEA, baik dari aktor pemerintah maupun non pemerintah sebagai strategi untuk mencapai kepentingan nasional negara.

D. Hipotesis

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan jawaban sementara UEA melakukan kerjasama di berbagai sektor dengan Israel merupakan bagian dari strategi *multitrack diplomacy* untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan menjaga keamanan negara yang ditunjukkan dengan kerjasama antar pemerintah, kerjasama antar organisasi, kerjasama di sektor bisnis, privat hingga akademik.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeksripsikan bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Uni Emirate Arab untuk mengimplementasikan kesepakatan Abraham Accord sebagai strategi mempertahankan kekuatan ekonomi dan menjaga keamanan negaranya di kawasan Timr Tengah. Stratego diplomasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dalam mengimplementasikan kesepakatan Abraham Accord tidak sekadar untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional negara, namun juga bertujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, dan membuka peluang kerjasama yang beragam dengan Israel. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mendasari Uni Emirate Arab melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, baik dari sisi internal maupun eksternal.

F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjelaskan studi kasus yang diambil adalah metode kualitatif. Menurut (Moleong : 2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hidayat, 2020). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati. Oleh karena itu, data-data yang nantinya dibutuhkan dalam penelitian ini akan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan dan akan disajikan dalam bentuk konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah (Arikunto, 2011).

Data yang digunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diartikan sebagai data yang bukan berasal dari usaha sendiri peneliti dalam pengumpulannya. Data yang digunakan berarti berasal dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya yang berarti bukan berasal dari peneliti sendiri (Marzuki, 2000). Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diartikan sebagai penelitian yang menggunakan sumber-sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data yang akan memperkuat penelitian (Zed, 2004, p. 21). Data-data dari perpustakaan dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku, majalah, kamus, skripsi, karya ilmiah dan bahkan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat (Harahap, 2014). Data dari penelitian pustaka juga diperkuat oleh data pendukung yang berasal dari berita dan informasi-informasi penting yang termuat di dalam situs pemerintah negara, *e-book*, *website* maupun media massa lainnya. Data yang telah ditemukan kemudian secara eksplanatif digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan untuk mencegah pembahasan penelitian menjadi luas dan kurang efektif. Penelitian ini memiliki fokus pada pembahasan mengenai upaya diplomasi yang dilakukan oleh UEA terhadap

Israel melalui kerangka kerjasama Abraham Accord untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Batasan waktu yang digunakan di dalam penelitian ini adalah diantara tahun 2012-2022. Tahun 2012-2020 merupakan jangkauan waktu UEA memiliki hubungan harmonis dengan Israel. Kemudian pada tahun 2020 kedua negara memutuskan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Sedangkan, tahun 2020-2022 merupakan tahun dimana UEA melakukan upaya diplomatik dengan Israel melalui kerangka kerjasama Abraham Accord dalam berbagai sektor untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu memperkuat posisi dan keamanan negara di Timur Tengah. Tahun 2022 juga sekaligus menjadi batas penelitian diambil.

H. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi menjadi empat bab. Pada keempat bab ini, penulis akan menjabarkan secara detail setiap sub bab yang mengandung topik-topik berbeda yang diangkat. Pada setiap sub bab yang ditulis, pembahasan yang disajikan memiliki korelasi dan keterkaitan antar satu sub bab dengan sub bab lainnya membentuk sebuah pemahaman terhadap isu yang diangkat. Penulisan dan penjabab setiap sub bab ini tersampaikan dengan rapi agar keseluruhan informasi yang disajikan dapat membentuk sebuah karya tulis yang terstruktur dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ini ke dalam empat sub bab, yaitu

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi delapan poin penting. Poin pertama membahas mengenai latar belakang dari isu yang diangkat. Pada latar belakang dijelaskan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh UEA, yaitu dalam sektor ekonomi dan militer yang mendorong negara tersebut menjadi salah satu negara dengan posisi strategis di kawasan Timur Tengah. Namun potensi yang dimiliki oleh UEA tidak serta merta membuat negara tersebut merasa aman terhadap keamanan nasionalnya maupun posisinya di

kawasan Timur Tengah. Tidak hanya UEA, negara tetangganya Israel juga mengalami persoalan yang serupa. Hal ini yang kemudian mendasari UEA untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena adanya kesamaan terhadap ancaman yang dimiliki dan UEA melihat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dapat membantu negaranya mencapai kepentingan nasional yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian merumuskan sebuah rumusan masalah dengan mempertanyakan upaya yang dapat dilakukan oleh UEA sebagai strategi untuk memperkuat posisi dan keamanan negaranya di kawasan Timur Tengah pada tahun 2020-2022. Dari rumusan masalah ini, penulis kemudian mengkaji lebih lanjut melalui sub bab kerangka teori dengan menggunakan konsep *multitrack diplomacy* yang diperkuat dengan teori *neorealisme*. Dari kerangka teori yang digunakan kemudian memunculkan sub bab hipotesis yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh UEA dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk mencapai kepentingan nasional negaranya dilakukan melalui empat jalur, yaitu *government* (jalur pertama), *nongovernment* (jalur kedua), *business* (jalur ketiga), *private citizen* (jalur keempat), dan *research, training, and education* (jalur kelima).

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk upaya diplomasi yang dilakukan oleh UEA dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk memperkuat posisi dan menjaga stabilitas keamanan negaranya di kawasan Timur Tengah, serta menganalisa faktor-faktor yang mendasari Uni Emirate Arab melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, baik dari sisi internal maupun eksternal yang tercantum pada sub bab tujuan penelitian. Selanjutnya, pada sub bab metodologi penelitian disebutkan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen resmi, buku, artikel jurnal, e-book, website berita,

dan-lain-lain. Selain itu, penulis juga menjabarkan jangkauan penelitian yang dilakukan pada tahun 2012-2020 dan diperjelas dengan sistematika penulisan pada skripsi ini.

BAB II merupakan bab pembahasan yang di dalamnya akan membahas mengenai kondisi geopolitik UEA di kawasan Timur Tengah dengan perspektif realisme neoklasik. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan potensi domestik yang dimiliki oleh UEA yang menjadikannya sebagai salah satu negara yang kaya dan strategis di Timur Tengah namun hal ini tidak membuat UEA menjadi negara yang aman dari ancaman-ancaman di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini akan diperkuat dengan potensi ancaman yang dapat mengganggu posisi dan stabilitas keamanan UEA yang berasal dari negara tetangganya, yaitu Iran. Penjelasan pada bab ini juga akan mencakup hubungan yang terjalin antara UEA dengan Israel karena keduanya memiliki persamaan dalam melihat Iran sebagai potensi ancaman yang kuat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor UEA memiliki kedekatan hubungan dengan Israel.

BAB III merupakan pembahasan bab lanjutan yang akan membahas mengenai strateg-strategi yang dilakukan oleh UEA untuk mengimplementasikan kerjasama Abraham Accord demi mempertahankan kekuatan ekonomi dan menciptakan keamanan nasionalnya dari segala bentuk ancaman. Pada bab ini, penulis akan memaparkan berbagai kerjasama yang dilakukan oleh UEA terhadap Israel dengan melibatkan berbagai aktor dan sektor yang memanfaatkan jalur-jalur pada *multitrack diplomacy*. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah UEA terdiri atas lima jalur, yaitu *government* (jalur pertama), *non-government* (jalur kedua), *business* (track ketiga), *private citizen* (track keempat), dan *research, training, and education* (track kelima) yang merupakan implementasi dari *multitrack diplomacy*.

BAB IV merupakan bab yang akan membahas kesimpulan, saran dan penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas sebelumnya.